



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI PURWANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3. NHK : 172181

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 174.350.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/70 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 37.350.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 432 m²/20 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 47.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 17.8 m²/10 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 46.900.000

1. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
4. MOTOR, YAMAHA BJ8 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 18.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.500.000**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 52.204.336**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 276.954.336

III. HUTANG Rp. 38.783.253**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 238.171.083



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.